

BAB V

REFLEKSI HASIL PENELITIAN

Bagian ini akan membahas mengenai diskusi hasil penelitian tentang pengalaman perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dari partisipasi pada kegiatan Komnas Perempuan. Setelah melakukan tahapan penelitian sebelumnya yakni membuat deskripsi tekstural dan deskripsi struktural dari hasil reduksi data, peneliti melanjutkan penyusunan esensi yang didapatkan dari hasil reduksi dan analisis temuan data dari empat informan yang berbeda. Selanjutnya, bab ini akan membahas mengenai refleksi dari temuan penelitian, baik secara teoritis, praktis, dan sosial. Pembahasan akan didasarkan pada sumber-sumber referensi yang relevan, dan hasil diskusi tersebut akan menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun rekomendasi pada bagian penutup penelitian.

5.1 Implikasi Teoretis

Berdasarkan teori penelitian yang digunakan, yaitu *Standpoint Theory*, dijelaskan bahwa terdapat ide pemahaman yang berlapis yakni dimana identitas-identitas individu yang tumpang tindih membentuk sudut pandang individu tersebut. Dalam perspektif feminisme, epistemologi teori standpoint juga mempertimbangkan variasi dalam memahami sudut pandang berbeda yang dibawa oleh perempuan dalam komunikasi dan bagaimana mereka menerapkan pemahaman tersebut dalam praktik nyata (Littlejohn & Foss, 2008). Berdasarkan asumsi dalam teori ini, diketahui bahwa memahami fitur-fitur unik dari pengalaman perempuan merupakan upaya yang hanya bisa diketahui dengan memerhatikan interpretasi perempuan mengenai pengalaman tersebut. Terdapat

tiga elemen penting yang disebutkan dalam teori *standpoint* yang juga membantu menjelaskan temuan penelitian, yakni *standpoint*, *situated knowledge*, dan *sexual division of labor*.

Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan teori standpoint karena berkaitan dengan bagaimana pengalaman seluruh informan yang merupakan perempuan dibentuk oleh pengalaman pribadi yang bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan kekerasan seksual, identitas dan posisi sosial, akses terhadap media dan informasi terkait kekerasan seksual, hingga termasuk interaksi informan dengan gerakan pemberdayaan perempuan yang dilatarbelakangi agenda feminisme. Diketahui juga bahwa partisipasi informan dalam kegiatan kampanye anti kekerasan dari Komnas Perempuan didasarkan pada perhatian dan ketertarikan informan pada isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang terbentuk dari pemahaman sebelumnya. Temuan ini sejalan dengan elemen *standpoint* yang menekankan bahwa perspektif terbentuk dari pengalaman terstruktur dan bahwa *standpoint* dicapai melalui pengalaman-pengalaman seperti penindasan, keterlibatan aktif, refleksi, dan kesadaran individu (West & Turner, 2008).

Pada elemen kedua standpoint theory yaitu *situated knowledge* yang merujuk pada kondisi dimana pengetahuan individu bersifat ganda dan tersituasi dalam pengalaman mereka, artinya bahwa yang dipelajari individu dengan individu lain akan berbeda karena posisi mereka (Haraway, 1988 dalam West & Turner, 2008). Pengalaman terdahulu yang dibawa sebagai latar belakang partisipasi dalam kegiatan kampanye Komnas Perempuan memunculkan temuan-temuan yang unik. Seluruh informan memiliki pengalaman yang membentuk perspektif mereka

tentang hal-hal yang berhubungan dengan Komnas Perempuan sebagai penyelenggara kampanye, dan yang berkaitan dengan upaya Komnas Perempuan sebagai lembaga yang mengawasi isu perempuan. Masing-masing informan juga membawa pengetahuan mereka mengenai fenomena kekerasan seksual di Indonesia, yang didapat dari konsumsi media online, dan pengalaman di organisasi atau komunitas perempuan. Oleh karena itu, proses nilai-nilai anti kekerasan seksual dan pesan kampanye dari Komnas Perempuan diinternalisasi informan dengan cara yang beragam sesuai dengan konteks sosial mereka berada.

Elemen ketiga adalah *sexual division of labor*, yang merujuk pada marginalisasi perempuan dalam banyak aspek kehidupan. Meskipun tidak secara eksplisit ditemukan pada pengalaman langsung informan selama kegiatan, penelitian ini menemukan bahwa informan memiliki pemahaman serupa tentang kondisi yang secara sistematis merugikan perempuan di masyarakat Indonesia. Berhubungan dengan pesan kampanye Komnas Perempuan, seluruh informan mengidentifikasi stereotip gender sebagai masalah yang dihadapi perempuan, bahkan membebani perempuan korban kekerasan dalam penanganan kasus. Temuan ini sejalan dengan elemen *sexual division of labor* karena menunjukkan bagaimana peran sosial perempuan dibebani oleh asumsi tentang gender. Dikotomi hubungan gender antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk dari wacana stereotip maskulin dan feminin dalam sistem patriarki jelas menghasilkan ketidakadilan bagi perempuan (Febriyanti & Rahmatunnisa, 2022).

5.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai anti kekerasan seksual dalam kampanye Komnas Perempuan ditanggapi dengan cara yang beragam oleh partisipannya. Dengan menginternalisasikan pesan-pesan kampanye dari Komnas Perempuan, partisipan perempuan juga memperkaya perspektif mereka tentang Komnas Perempuan beserta agenda yang dilakukan untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya kegiatan kampanye peringatan 16 HAKTP tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Komnas Perempuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang timbul dari kegiatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan tahun tersebut.

Sesuai dengan mandat kewenangan dalam Peraturan Presiden No.65 Tahun 2005, Komnas Perempuan memiliki tugas menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia beserta upaya pencegahan, penanggulangan, serta penghapusannya (Billah, 2020). Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipan kampanye memahami berbagai pesan penting, seperti pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual pada korban beserta stigma sosial yang menyertainya, serta pengetahuan tentang kebijakan hukum di Indonesia yang melindungi korban kekerasan seksual.

Dengan memahami cara partisipan menginternalisasi pesan-pesan ini, Komnas Perempuan dapat memperbaiki metode dan saluran penyampaian pesan untuk memastikan materi yang disampaikan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas tentang isu perempuan di Indonesia.

Salah satu hambatan pelaksanaan kampanye tahunan 16 HAKTP Komnas Perempuan adalah adanya *gap* pengetahuan diantara setiap khalayak yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia (Sari & Savitri, 2019). Berdasarkan temuan dari informan penelitian ini yang merupakan partisipan kegiatan di tahun 2023, dengan kolaborasi bersama organisasi perempuan bahkan bersama dukungan pemerintah daerah, menjadi peluang baru bagi Komnas Perempuan untuk menjangkau masyarakat daerah dengan kegiatan, dan pesan-pesan yang menyesuaikan fenomena di lapangan sehingga lebih efektif bagi masyarakat setempat. Kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan Komnas Perempuan untuk mengembangkan program yang lebih inklusif dan memperhatikan variasi kegiatan berdasarkan konteks sasaran partisipannya di masa mendatang.

5.3 Implikasi Sosial

Komnas Perempuan, sebagai komunikator utama, menjalankan kegiatan komunikasi melalui kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah perilaku masyarakat dalam melihat isu kekerasan terhadap perempuan, serta mendorong masyarakat membentuk gerakan serupa guna turut serta menekan peningkatan kasusnya (Sari & Savitri, 2019). Melalui penelitian ini, pengalaman individu perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual terhadap perempuan yang didapat dari pesan-pesan kampanye anti kekerasan oleh komnas perempuan dapat memberikan kontribusi secara sosial berupa perspektif baru bagi masyarakat terutama kepada sesama individu perempuan. Dengan adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, pemahaman, serta urgensi mengenai isu tersebut di

kalangan perempuan, masyarakat diharapkan juga mampu mengenali dan menghindari terjadinya pelanggaran HAM berupa tindakan kekerasan seksual, serta diskriminasi dan kriminalisasi kepada korban kekerasan seksual.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja sama dan sinergi dari banyak kelompok dan komponen masyarakat, salah satunya untuk menggalang gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM (komnasperempuan.go.id). Dengan demikian, penelitian ini membantu masyarakat khususnya perempuan mengetahui keberadaan gerakan sosial yang dilaksanakan Komnas Perempuan bersama dengan organisasi masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif lebih banyak anggota masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus, pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, serta pengawasan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur isu ini di masyarakat. Selain itu, bagi perempuan khususnya, implikasi tersebut diharapkan mampu mendorong keberanian dalam memperjuangkan hak-hak perlindungan dibawah hukum dan berkontribusi lebih besar pada pelaporan kasus sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia.